

SEMINAR HASIL PENELITIAN  
(UJIAN PENDADARAN)

*IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
GRATIS (STUDI KASUS PUSKESMAS TANJUNG PALAS,  
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019)*

OLEH :  
**PUTRI AYU WULANDARI**  
**NPM. 201651006**



**KAMIS, 16 JULI 2020**

**Kesehatan merupakan keadaan yang bersifat berubah-ubah dimana seseorang akan mengalami penyesuaian keadaan dengan tempat tinggalnya. Kesehatan juga adalah dasar untuk tetap hidup secara produktif**

**Salah satu pelayanan publik yang perlu diutamakan adalah sektor pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat secara umum.**



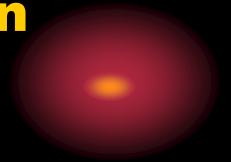
## **UNDANG-UNDANG 1945**

### **Pasal 28 H ayat (1)**

**“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” .**

### **Pasal 34 ayat (3)**

**“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.**

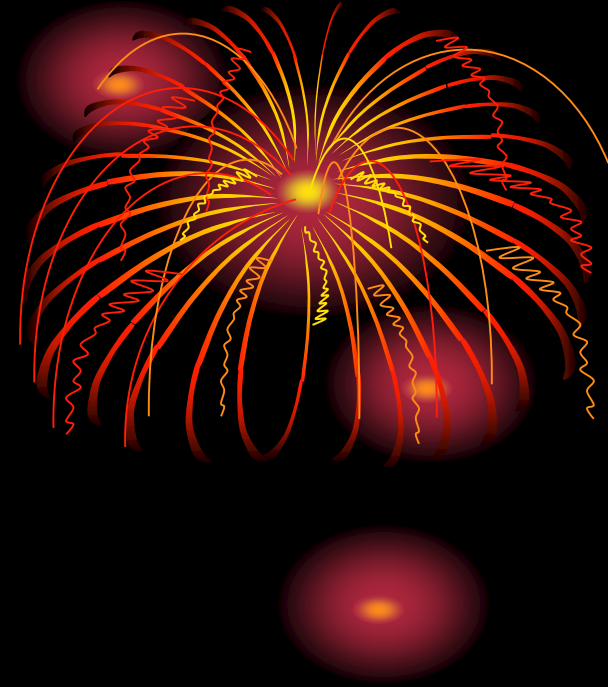


**Upaya pemerintah membangun fasilitas pelayanan seperti:**

**1. Membangun Puskesmas**

**2. Membangun Rumah Sakit**

- **Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, pemerintah memberikan bantuan berupa program jaminan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat**
- **“Semakin baik status kesehatan penduduk suatu negara semakin baik pula tingkat perekonomiannya dengan demikian akan lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut” (Mey Harsanti 2014: 2).**





**Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa jaminan sosial adalah bentuk pelayanan bagi seluruh masyarakat sehingga kebutuhan hidupnya termasuk pelayanan kesehatan pengobatan gratis terpenuhi.**

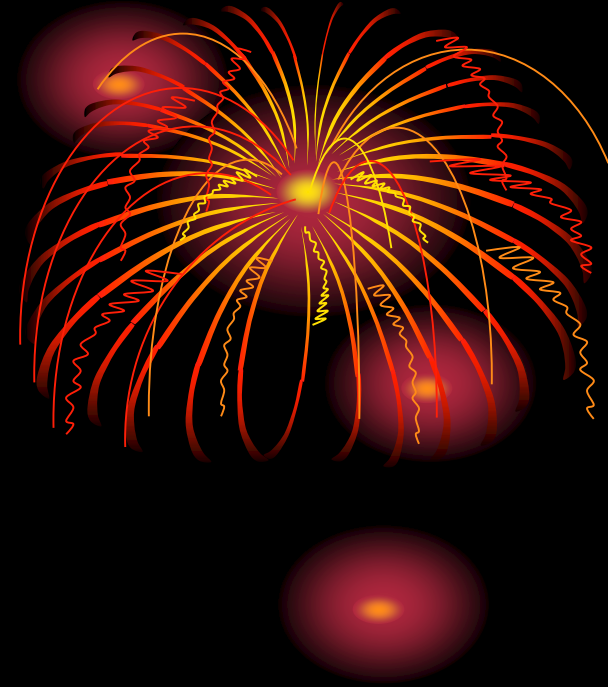
- **Program pemerintah (JKN) memiliki tujuan untuk memastikan bahwa jaminan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif, melalui badan penyelenggara jaminan nasional (BPJS).**

**Badan Penyelenggara  
Jaminan Nasional (BPJS)  
merupakan badan usaha  
dibawah naungan negara  
yang ditugaskan  
pemerintah untuk  
menjalankan pemeliharaan  
jaminan kesehatan  
khususnya bagi seluruh  
penduduk Indonesia,**

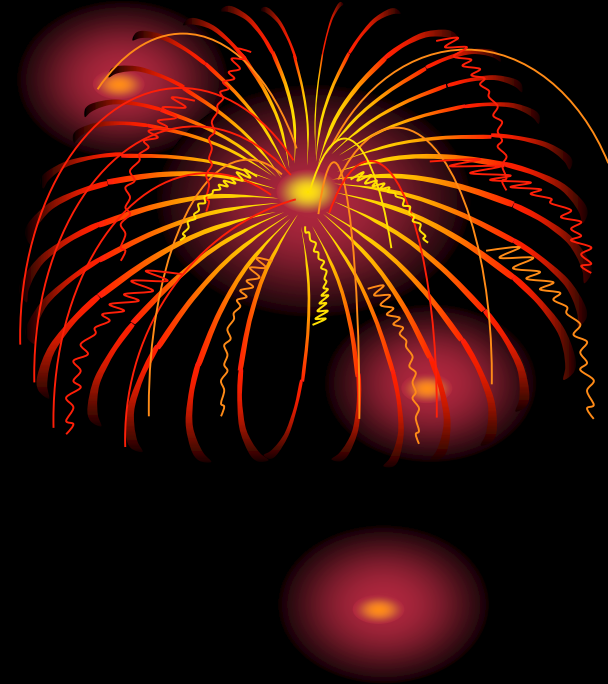
**implementasi  
penyelenggaraan  
jaminan kesehatan  
(BPJS) telah lama  
dirasakan masyarakat  
sejak terbitnya**



**Undang-Undang No 24  
Tahun 2014. Tentang  
penyelenggaraan  
jaminan kesehatan.**



**Jaminan kesehatan gratis  
berdampak positif  
dilingkungan masyarakat  
dilihat dari antusias  
masyarakat dalam mendapatkan  
kartu kesehatan gratis.**



**Kendala implementasi dalam  
penyelenggaraan jaminan  
kesehatan gratis**



- 1. Masyarakat miskin belum menyentuh pelayanan gratis secara sepenuhnya,**
- 2. Persoalan yang muncul ketidakpahaman dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada segenap masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang jaminan kesehatan gratis**

## Alur Berfikir

**Undang-Undang Tahun 45  
Pasal 28 tentang Jaminan  
Kesehatan Nasional (JKN)**

**Implementasi Program  
Jaminan Kesehatan  
Gratis Di Puskesmas  
Tanjung Palas Kabupaten  
Bulungan**

Faktor-faktor Penghambat program  
jaminan kesehatan gratis:

1. Ekonomi masyarakat kurang mampu
2. Aspek kepesertaan tentang nomor induk kependudukan (NIK)
3. Pelayanan portabilitas
4. Kriteria gawat darurat jadi kendala pelaksanaan pelayanan kesehatan dilapangan.

Pengaruh implementasi memiliki 6 variabel:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi implementor

Sumber: Van Meter dan Horn (1975)





**Hipotesis :**

- **Implementasi Program Jaminan Kartu Indonesia Sehat Sangat Berpengaruh Terhadap Masyarakat Miskin /Kurang Mampu Dalam Hal Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Sehingga Masyarakat Miskin Terbantu Dalam Hal Pengobatan Di Puskesmas maupun Rumah Sakit**
- **Memiliki 2 Kategori Hambatan Antara Lain Internal Dan Eksternal**

**Metode Penelitian :**

**Menggunakan Dekriptif Kualitatif**

**Teknik Pengambilan Data :**

**Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi**



# HASIL DAN PEMBAHASAN



## A. HASIL PENELITIAN

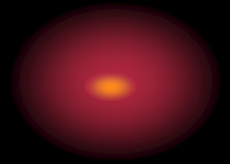
Implementasi program jaminan Kartu Indonesia Sehat merupakan rangkaian kebijakan yang menentukan keberhasilan program sesuai dengan undang-undang dan sebagai kekuatan hukum dari program layanan kesehatan

Keberhasilan suatu sistem kebijakan publik dapat diukur melalui terselenggaranya program pelayanan kesehatan serta manfaatnya dapat dirasakan masyarakat kurang mampu

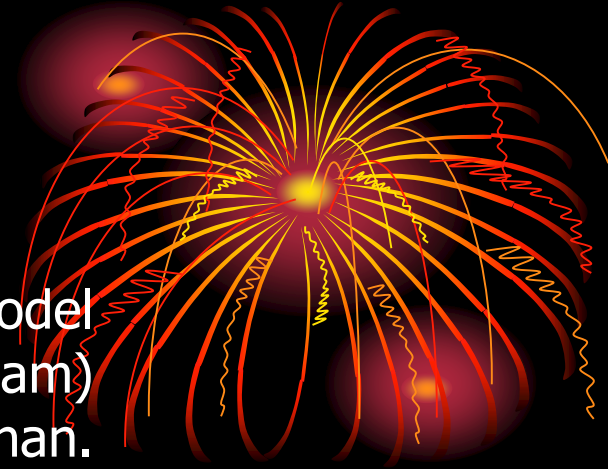
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data yang dapat menunjukkan bahwa Implementasi Program Jaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah diterapkan pihak BPJS, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Tanjung Palas. Ketiga Instansi tersebut di atas bersinergi dalam menjalankan amanat dan kebijakan dari program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam bentuk pelayanan kesehatan.



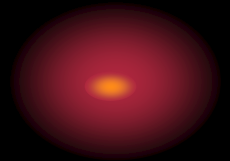
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data berdasarkan uraian deskripsi terhadap implementasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Tanjung Palas.



Adapun analisis data menggunakan model Van Meter dan Horn yaitu tentang 6 (enam) pengaruh implementasi terhadap pelayanan.



- 1. Standar Ukuran Keberhasilan Dan Sasaran Dari Program JKN-KIS**
- 2. Sumber Daya Pelayanan Kesehatan**
- 3. Komunikasi Organisasi Terjalin Sehingga Mencapai Keberhasilan Keberlangsungan Program KIS**
- 4. Karakteristik Agen Pelaksana**
- 5. Dampak Pengaruh keterlibatan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik**
- 6. Respon disposisi agen pelaksanaan program JKN-KIS**



# **Interprestasi Masyarakat Tentang Hambatan Pelaksanaan Pelayanan JKN-KIS.**



- **Latar belakang dari program ini mengutamakan pendekatan kuantitas dan kualitas, pendekatan kuantitas terpaku pada penambahan kepersertaan PBI, sedangkan pendekatan kualitas diintegrasikan berdasarkan layanan preventif, diagenis, dan promotif.**
- **Sebagai program unggulan tentu memiliki perencanaan yang sudah terkondisi dengan sebaik mungkin, namun pada implementasinya masih terdapat kendala serta hambatan yang mengakibatkan terjadinya persoalan dimasyarakat sebagai penerima layanan.**



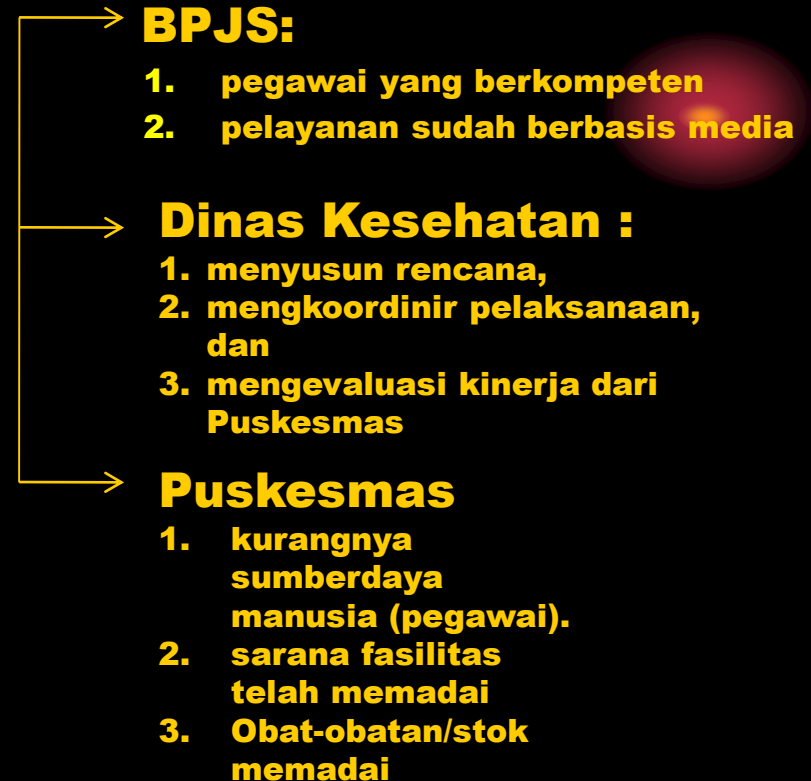
**Selanjutnya Proses Implementasi merupakan performasi suatu kebijakan dan pada dasarnya dilakukan untuk mencapai sebuah keberhasilan kinerja yang saling berhubungan dengan 6 variabel secara linier untuk menentukan kebijakan publik.**

- **Standar Dan Sasaran Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian Keberhasilan dari program JKN-KIS dapat diukur melalui kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, selain itu program tersebut sudah tepat sasaran dan telah banyak membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam hal menerima pelayanan kesehatan dari puskesmas



## Sumber Daya Pelayanan Kesehatan



# Hubungan Antar Organisasi

- Berdasarkan hasil dari penelitian, langkah utama yang dilakukan BPJS berupa upaya preventif melalui komunikasi yang interen dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Puskesmas.
- Untuk menganalisa sejauh mana program JKN-KIS telah berjalan, maka pihak BPJS melakukan tinjauan melalui pertemuan secara berkala bersama stakeholder.

## Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam hasil penelitian ini karakter agen pelaksana bersandar pada Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial yang merupakan pedoman dari program JKN-KIS.



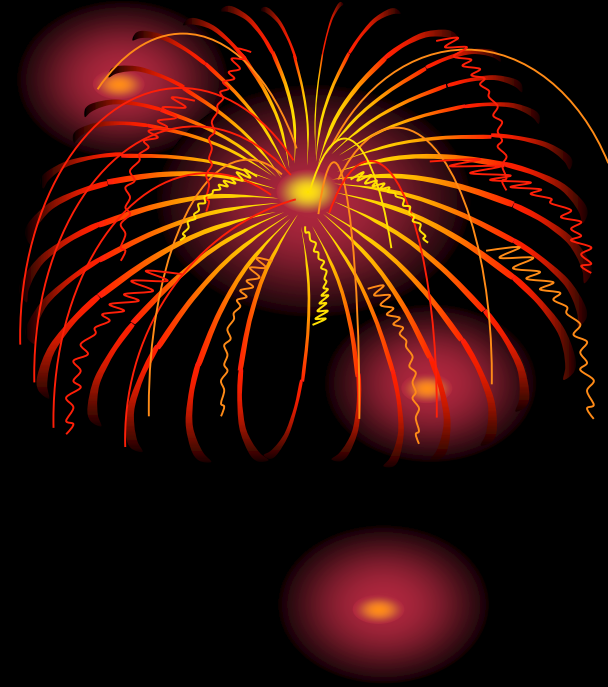
keberhasilan dari kebijakan implementasi program JKN-KIS dapat diidentifikasi dan diketahui melalui karakteristik agen pelaksana berdasarkan struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola, hal itu akan mempengaruhi keberhasilan dari program tersebut.



## **Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, Dan Ekonomi**

**Berdasarkan hasil penelitian, Ketiga unsur sosial, politik, dan ekonomi bersinergi mendukung keberhasilan dari program JKN-KIS.**

**Dan jika dipandang dari sudut lingkungan sosial output yang diperoleh memberikan manfaat besar bagi masyarakat menengah kebawah atau miskin, sedangkan dari faktor sumberdaya ekonomi program tersebut mendorong terjadinya kontribusi peningkatan perekonomian di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan untuk sektor politik kebijakan yang ada akan membantu terlaksananya program JKN-KIS untuk kepentingan publik.**



## **Respon Disposisi**

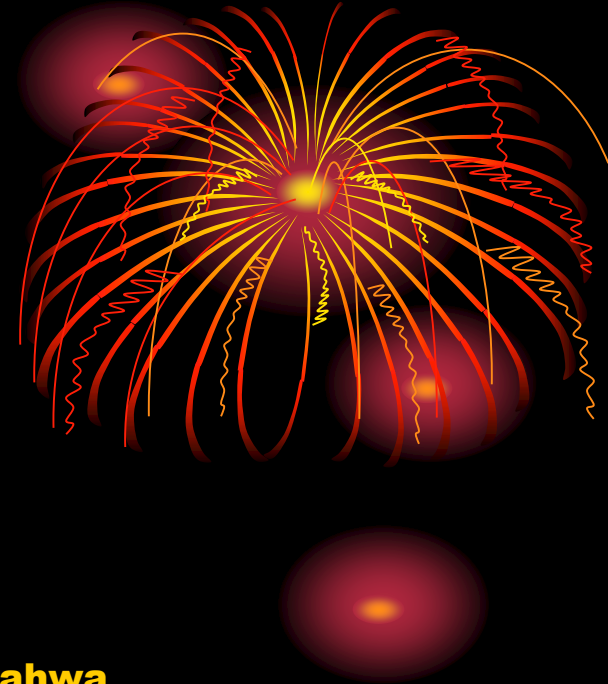
**Berdasarkan hasil penelitian menunjukan, implementasi dari sikap kebijakan atau disposisi pada program JKN-KIS berlandaskan manajemen pedoman tata kelola sebagai dukungan kinerja dalam pelaksanaan program KIS telah berjalan secara maksimal. Hal itu dapat dilihat berdasarkan respon para agen pelaksana yang telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Tanjung Palas.**

# Faktor Penghambat Program KIS



**Faktor internal**  
faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumberdaya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan

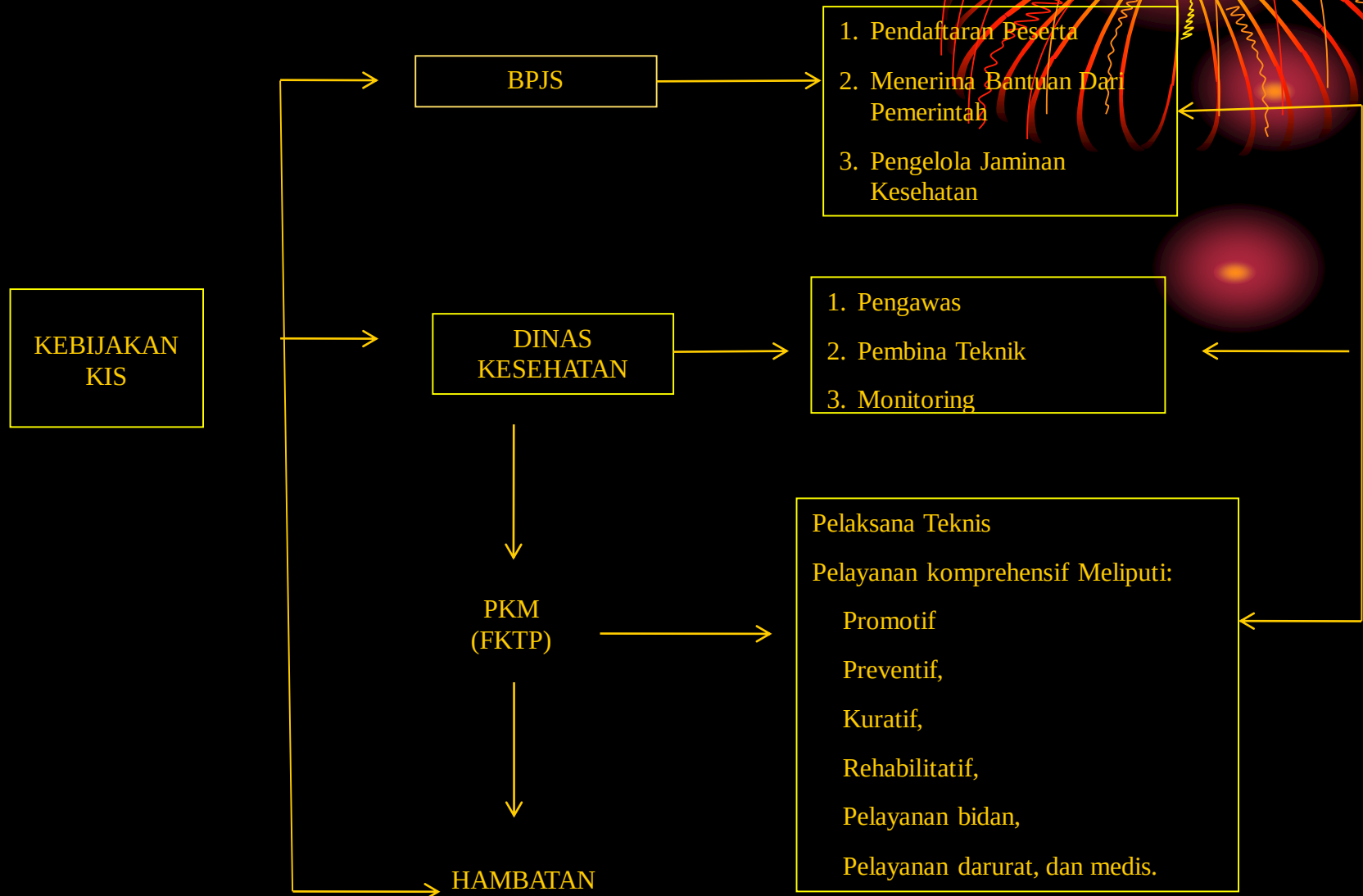
**Faktor internal**  
faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.



## **Kesimpulan**

**Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Implementasi Program Jaminan Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Tanjung Palas Secara Umum Sudah Terselenggara Dengan Baik, Namun Terdapat Beberapa Kendala Yang Menjadi Penghambat Dari Proses Implementasi Yaitu Faktor Penghambat Internal Maupun Faktor Penghambat Eksternal. Implementasi Program Jaminan Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Tanjung Palas Dapat Dilihat Pada Bagan Berikut:**

## 5.1 BAGAN IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KARTU INDONESIA SEHAT



Terima Kasih

